

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian penting dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Dengan menganut asas otonomi daerah, Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pedesaan dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Desa yang diakui oleh sistem Pemerintahan Indonesia. Kewenangan Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai salah satu Desa di Indonesia, Desa Pinggirsari terletak di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat terbentuk pada tahun 1969 turut memikul tugas untuk membangun dan memberdayakan Desa. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa tidak akan pernah terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yaitu sebagai rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73 terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada sisi struktur anggaran Pendapatan Desa karena Belanja Desa akan dipengaruhi oleh hasil Pendapatan Desa khususnya yang dimiliki oleh Desa Pinggirsari. Disebabkan Desa memiliki otonomi asli yaitu memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Desa maka Desa harus memiliki sumber pendapatan sendiri selain sumber dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi untuk menambah penghasilan Pendapatan terutama dalam menambah Pendapatan Asli Desa.

Pertama, berdasarkan fenomena yang penulis temukan dan hasil wawancara penulis dengan Bapak Saepurrohman selaku Sekretaris Desa Pinggirsari, beliau mengatakan bahwa :

“Pendapatan Desa khususnya Pendapatan Asli Desa sumber dananya dari pengelolaan gedung Gelanggang Olah Raga (GOR) Desa karena Desa Pinggirsari tidak mempunyai tanah bengkok”. (Wawancara pada Hari Kamis, 26 Oktober 2017).

Tanah bengkok adalah tanah desa sebagai kekayaan milik desa yang tidak boleh diperjual-belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk oleh Kepala Desa atau perangkat desa kecuali untuk kepentingan umum. Tetapi Desa Pinggirsari tidak memiliki tanah bengkok sehingga menyebabkan kontribusi bagi Pendapatan Desa cukup rendah.

Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa Pinggirsari dapat dibuktikan oleh tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap Total Pendapatan Desa Pinggirsari Tahun 2013-2016

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Total Pendapatan Desa	Selisih
2013	94.990.000,00	540.559.680,00	17.57%
2014	94.500.000,00	908.325.380,00	10.40%
2015	112.700.000,00	1.683.797.100,00	6.69%
2016	21.875.000,00	1.871.603.000,00	1.16%

Sumber : Desa Pinggirsari, Arjasari, Bandung (data diolah, 2017)

Tabel diatas menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Desa yang dihasilkan Desa Pinggirsari dengan Total Pendapatan Desa Pinggirsari pada tahun 2013-2016 yang dinilai masih rendah bahkan terus menurun disetiap tahunnya terlebih pada tahun 2016 selisihnya mencapai 1.16%. Data tersebut telah menunjukkan bahwa kontribusi Pemerintah Desa Pinggirsari dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa masih rendah dalam menggali potensi-potensi dan sumber-sumber kekayaan Desa.

Kedua, penulis menemukan informasi berupa data rendahnya Pendapatan Asli Desa Pinggirsari jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer dari Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi. Berikut tabel Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer Desa Pinggirsari pada tahun 2013-2016.

Tabel 1.2. Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer Desa Pinggirsari

Tahun 2013-2016

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer	Selisih
2013	94.990.000,00	813.135.380,00	7.8%
2014	94.500.000,00	986.890.000,00	8.9%
2015	112.700.000,00	1.571.097.100,00	14.6%
2016	21.875.000,00	1.849.728.000,00	18.2%

Sumber : Desa Pinggirsari, Arjasari, Bandung (data diolah, 2017)

Berdasarkan tabel diatas, selisih antara Pendapatan Asli Desa dengan Pendapatan Transfer selalu meningkat disetiap tahunnya maka bisa dikatakan tingkat kemandirian Pendapatan Asli Desa Pinggirsari masih rendah dalam menggali potensi-potensi dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan Desa. Artinya tingkat ketergantungan Pendapatan Desa Pinggirsari masih sangat tinggi terhadap bantuan anggaran dari Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disebutkan bahwa Desa harus diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan mandiri dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, tetapi Desa Pinggirsari belum bisa dikatakan sebagai Desa yang mandiri karena tingkat ketergantungan yang masih sangat tinggi terhadap bantuan-bantuan dana dari Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi.

Untuk mengetahui tinggi atau rendahnya Pendapatan Desa Pinggirsari maka diperlukan suatu pengukuran atau penilaian terhadap kinerja Pendapatan Desa dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan, dan Rasio Kemandirian sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Pinggirsari agar selalu meningkatkan kinerja pendapatannya.

Sehingga berdasarkan fenomena dan data diatas, penulis menganggap penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut di Desa Pinggirsari melalui judul skripsi **“Analisis Kinerja Pendapatan Dalam Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Tahun 2013-2016”**.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Pendapatan Asli Desa Pinggirsari jauh lebih kecil dari total penerimaan Desa Pinggirsari.
2. Pendapatan Asli Desa Pinggirsari jauh lebih kecil dari Pendapatan Transfer yang menandakan bahwa tingkat kemandirian Pendapatan Desa Pinggirsari masih rendah.
3. Ketergantungan Pendapatan Desa Pinggirsari masih sangat tinggi terhadap bantuan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Provinsi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Desa Pinggirsari terhadap Total Pendapatan Desa Pinggirsari dari segi Derajat Desentralisasi?
2. Bagaimana Rasio Ketergantungan Pendapatan Desa Pinggirsari terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi?
3. Bagaimana Rasio Kemandirian Pendapatan Desa Pinggirsari dari segi Pendapatan Asli Desa?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Desa Pinggirsari terhadap Total Pendapatan Desa Pinggirsari dari segi Derajat Desentralisasi.
2. Untuk mengetahui Rasio Ketergantungan Pendapatan Desa Pinggirsari terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.
3. Untuk mengetahui Rasio Kemandirian Pendapatan Desa Pinggirsari dari segi Pendapatan Asli Desa.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan yang dapat memberikan informasi

empiris dan teoritis bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tentang Pendapatan Desa sehingga dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai gambaran dan masukan bagi Pemerintah Desa agar selalu meningkatkan kinerja keuangan Desa khususnya pada kinerja Pendapatan Desa agar menjadi Desa yang mandiri dan maju.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja Pendapatan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana dan pembangunan serta pemberdayaan oleh Pemerintah Desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai dasar pembandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kajian kinerja Pendapatan Desa.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas dan pengalaman peneliti terkait akuntansi sektor publik atau khususnya kinerja Pendapatan Desa.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dimensi yang akan diteliti yaitu Derajat Desentralisasi Pendapatan Desa, Ketergantungan Pendapatan Desa, dan Kemandirian

Pendapatan Desa Pinggirsari dalam Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:125) :

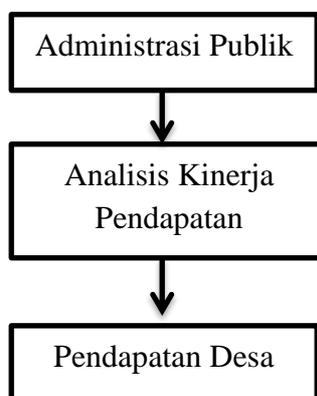
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.”

Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan menurut Mahmudi (2016:89) :

“Kinerja keuangan tercermin dari laporan realisasi anggaran yang perlu dianalisis agar dapat memberikan gambaran kinerja keuangan yang menginterpretasikan angka-angka yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau politik.”

Alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja pendapatan yaitu menggunakan analisis pendapatan menurut Mahmudi (2016:134) bahwa analisis rasio pendapatan keuangan daerah terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG